



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-22.OT.03.03 TAHUN 2025

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB INSTRUMEN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 182 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2024; b. bahwa sebagai upaya meraih capaian optimal dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta kejelasan penanggung jawab instrumen evaluasi reformasi birokrasi secara tertib, terpadu, dan bertanggung jawab, perlu dilakukan penetapan dengan Keputusan Menteri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penanggung Jawab Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994); 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*; 3. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

5. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGGUNG JAWAB INSTRUMEN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.
- KESATU Menetapkan Penanggung Jawab Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Menyelenggarakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan optimalisasi capaian Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - b. Menyusun konsepsi rencana aksi dalam pencapaian optimalisasi capaian Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - c. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian yang diperlukan dalam rangka pencapaian optimalisasi Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi;
 - d. Melaporkan pelaksanaan rencana aksi secara periodik kepada Sekretaris Jenderal.
- KETIGA : Sekretaris Jenderal menetapkan Rencana Aksi Optimalisasi Capaian Instrumen Evaluasi Reformasi Birokrasi paling lambat 1 (satu) bulan setelah keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025



Tembusan:

1. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
Nomor : M.IP-22.OT.03.03
Tanggal : 23 Juli 2025

PENANGGUNG JAWAB INSTRUMEN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Instrumen Evaluasi	Penanggung Jawab
General		
1.	Survei Penilaian Integritas	Sekretaris Inspektorat Jenderal
2.	Rencana Aksi Pembangunan RB General	
3.	Tingkat Maturitas SPIP	
4.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	
5.	Nilai SAKIP	
6.	Indeks Perencanaan Pembangunan	
7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	
8.	Capaian Akuntabilitas Kinerja: a Capaian Prioritas Nasional b Capaian IKU	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
9.	Tingkat Akuntabilitas Keuangan: a Opini BPK b Tindak Lanjut Rekomendasi	
10.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General	
11.	Indeks Pengelolaan Aset	
12.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	
13.	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	
14.	Tingkat Capaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi	
15.	Indeks Sistem Merit	
16.	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi Indeks Pelayanan Publik dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI): a Indeks Pelayanan Publik b Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi, dan Ketatalaksanaan

No.	Instrumen Evaluasi	Penanggung Jawab
17.	Indeks Berakh�ak	
18.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Kepala Biro Umum
19.	Indeks Reformasi Hukum	Kepala Biro Hukum dan Kerjasama
20.	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE	
21.	Indeks Pembangunan Statistik	
22.	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik
23.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	
24.	Indeks Kualitas Kebijakan	
25.	Survei Kepuasan Masyarakat	Kepala Pusat Strategi Kebijakan
Tematic		
1.	Pengentasan Kemiskinan	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
2.	Realisasi Investasi	Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi
3.	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting	Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik
4.	Prioritas Aktual Presiden	
	a Penggunaan Produk Dalam Negeri	Kepala Biro Barang Milik Negara
	b Pengendalian Inflasi	

